

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Selama sejarah umat manusia, gejala radikalisme agama tidak pernah berhenti dan tetap ada hingga saat ini. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, wacana tentang hubungan antara agama Islam dan radikalisme semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai tindakan kekerasan dan gerakan-gerakan radikal. Sejarah juga menunjukkan bahwa kekerasan dan radikalisme seringkali diidentifikasi dengan agama, karena agama memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Agama bisa mencapai tingkat spiritual yang tinggi, dan hal ini sering digunakan untuk melegitimasi berbagai tindakan radikal. Contohnya mulai dari mengkafirkan orang-orang yang berbeda pandangan hingga melakukan pembunuhan terhadap mereka yang berbeda ideologi [1].

Perkembangan radikalisme beragama di Indonesia termasuk di lingkungan perguruan tinggi, menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Citra perguruan tinggi agama yang seharusnya mencetak intelektual yang moderat pun diragukan karena adanya beberapa kasus radikalisme di lingkungan kampus. Beberapa tindakan seperti penggunaan cadar, kajian-kajian yang mendukung khilafah di masjid-masjid kampus, hingga penolakan terhadap diskusi oleh kelompok yang berbeda sering terjadi di lingkungan kampus. Pada tahun 2018, Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat bahwa 39% mahasiswa terpapar paham radikal di 15 Provinsi di Indonesia [2].

Fenomena ini diperkuat oleh survei Convey yang diterbitkan oleh PPIM UIN Jakarta pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa sikap keberagaman pada siswa/mahasiswa di Indonesia cenderung memiliki tingkat intoleransi dan radikalisme yang tinggi, di mana mereka mendukung penerapan syariah Islam di Indonesia [3]. Menurut Setara Institute, 10 Perguruan Tinggi Negeri, termasuk Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya,

Universitas Airlangga, Universitas Mataram, UIN Syarif Hidayatullah, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, menjadi sasaran radikalisasi [4].

Banyak penelitian tentang radikalisme di perguruan tinggi telah dilakukan. Sebagai contoh, ada studi yang mengukur tingkat pemahaman opini intoleran dan opini radikal mahasiswa [3]. Penelitian lain mengenai minat mahasiswa dalam belajar Pancasila dan kewarganegaraan ternyata minim [5]. Selain itu, ada juga studi yang mengungkap peran mahasiswa dalam mendemonstrasikan opini radikal dan faktor penyebabnya [6]. Generasi muda yang berada di lingkungan perguruan tinggi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kampus, namun kelompok radikal memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan ideologi dan gagasan radikalisme [7].

Pemikiran-pemikiran radikalisme termasuk penolakan terhadap nilai-nilai dasar negara dan pilar-pilar bangsa. Oleh karena itu, kelompok-kelompok radikal sering memiliki pandangan antisistem dan berusaha menggugah perjuangan untuk mengubah sistem yang ada, seperti sistem demokrasi dan pemilu. Mereka menolak Pancasila sebagai dasar negara dan meragukan keabsahan hukum yang dibuat oleh negara. Hal ini menyebabkan gerakan dan pemikiran radikalisme menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang telah menerima Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa dan sebagai dasar negara, serta sistem demokrasi dan pemilu sebagai mekanisme pemilihan pemerintahan [8].

Selain itu, Bandung Raya merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman agama, di mana terdapat berbagai kelompok masyarakat dengan keyakinan agama yang berbeda-beda [9]. Keberagaman ini dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perguruan tinggi keagamaan Islam berperan penting dalam memperkuat moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi dan saling menghormati di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Selain itu, studi ini juga mencatat adanya ancaman dari kelompok-kelompok yang rawan ekstremisme kekerasan, termasuk terorisme di kota Bandung. Beberapa

contoh temuan termasuk aksi teror bom bunuh diri di Astana Anyar pada tanggal 7 Desember 2022 yang diduga melibatkan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah [10]. Walikota Bandung juga dituding intoleran karena mendukung kelompok intoleran dalam meresmikan Gedung Dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) pada tanggal 28 Agustus 2022 [11]. Diskusi publik tentang “Potensi Gerakan Radikalisme di Tahun 2020” yang diadakan oleh Federasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung juga memprediksi potensi gerakan radikalisme yang terus berkembang di Bandung melalui media sosial [12].

Belakangan ini, terjadi fenomena yang mengkhawatirkan di mana orang-orang yang beragama justru terlihat mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, mereka hidup dengan semakin eksklusif padahal ajaran agama sebenarnya mengajarkan hidup secara inklusif. Mereka menggunakan pendekatan yang segregatif meskipun agama mengajarkan integratif. Sikap konfrontatif juga muncul di kalangan yang beragama, padahal seharusnya ajaran agama mendorong sikap kooperatif. Bahkan, beberapa orang yang beragama cenderung menjadi destruktif, sementara agama seharusnya mengajarkan untuk menjadi konstruktif. Fenomena semacam ini tidak hanya mengganggu kehidupan keagamaan dalam masyarakat yang majemuk, tetapi juga mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.

Belakangan ini, fenomena lain juga muncul, yaitu munculnya beragam tafsir keagamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didasarkan pada kaidah keilmuan yang benar. Orang-orang yang kurang memiliki kompetensi keilmuan cenderung dengan mudah menerjemahkan, menafsirkan, dan menginterpretasikan teks-teks kitab suci. Hal ini menyebabkan terjemahan dan tafsir keagamaan yang berlebihan dan keluar dari batas kewajaran. Sebagian orang hanya berfokus pada teks semata tanpa memperhatikan konteksnya, sementara yang lain menggunakan akal pikiran secara berlebihan dan melakukan interpretasi tanpa batas, bahkan bertentangan dengan teksnya. Akibatnya, muncul klaim kebenaran dan saling menyalahkan antar kelompok yang berbeda pandangan, bahkan dengan cara-cara kekerasan. Fenomena ini menyebabkan berbagai konflik sosial di masyarakat yang memiliki keragaman agama.

Fenomena yang tidak elok juga terjadi atas nama agama, di mana beberapa orang secara demonstratif menyatakan bahwa Pancasila bertentangan dengan ajaran agama, menganggap bendera sang saka merah putih sebagai perbuatan menyekutukan Tuhan, dan menyatakan bahwa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah haram. Paham seperti ini dan pandangan lainnya yang sejenis jelas merusak ikatan kebangsaan dan memperlemah kesatuan Indonesia. Cara beragama yang berlebihan dan keluar dari batas tersebut juga berdampak negatif pada citra agama itu sendiri dan merusak harmoni dalam kehidupan bersama dengan umat agama lain [13].

Situasi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghadapi masalah serius terkait radikalisme beragama. Ironisnya, perguruan tinggi yang seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan generasi muda, justru menjadi tempat yang dipengaruhi oleh paham-paham radikal. Perguruan tinggi memiliki peran krusial sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga sebagai tempat yang menyuplai sumber daya manusia bagi bangsa. Di sinilah para calon intelektual dipersiapkan dan dibina untuk menjadi generasi penerus yang dapat membawa bangsa dan negara menuju masa depan yang lebih baik. Dengan peran strategis seperti itu, seharusnya perguruan tinggi bebas dari semua paham yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta tidak mengizinkan kegiatan yang bertentangan dengan peran dan fungsi mulia dari lembaga ini [14].

Dalam menghadapi permasalahan radikalisme beragama, pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan upaya untuk menyebarkan kampanye tentang moderasi beragama dalam berbagai kegiatan. Pada tahun 2019, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan tahun tersebut sebagai “Tahun Moderasi Beragama” dan menjadi sosok yang aktif mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama sebagai karakteristik utama dalam keberagaman masyarakat Indonesia [15]. Tahun tersebut juga menjadi momen di mana Kementerian Agama menerbitkan buku berjudul “Moderasi Beragama” sebagai langkah pencegahan terhadap radikalisme.

Lukman Hakim telah menyerukan agar moderasi beragama menjadi landasan utama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan beragama secara moderat telah menjadi ciri khas umat beragama di Indonesia, dan sesuai dengan kekayaan budaya dan agama yang beragam di masyarakat kita. Beragama secara moderat adalah bentuk beragama yang telah lama dijalankan dan tetap relevan di era saat ini [16]. Kementerian Agama telah melakukan berbagai langkah untuk memelihara perdamaian, termasuk pembentukan lembaga kerukunan, perumusan undang-undang, dan menerapkan praktik moderasi beragama. Seseorang yang mengamalkan moderasi beragama bertindak sesuai dengan keyakinannya (Kementerian Agama, 2019). Pada tahun yang sama, Kementerian Agama juga menugaskan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk aktif berkontribusi dan mengambil langkah strategis dalam memperkuat moderasi beragama (Kementerian Agama, 2019). Peran aktif perguruan tinggi diharapkan dapat membantu menghadapi paham radikal di Indonesia.

Penguatan moderasi beragama juga menjadi kebutuhan penting di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Dalam konteks ini, moderasi beragama diartikan sebagai bagaimana civitas akademika di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki sikap toleransi, simpati, dan tidak ekstrem dalam beragama, serta menerima perbedaan. Moderasi beragama diharapkan menjadi keseimbangan antara pengamalan ajaran agama individu dengan penghormatan terhadap ajaran agama orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan. Untuk mewujudkan penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama RI, terutama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-3663.1/DJ.I/BA.02/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang berisi tentang pendirian rumah moderasi. Setiap kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), STAIN/IAIN/UIN diminta untuk mendirikan rumah moderasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, menegaskan bahwa keberadaan rumah moderasi agama sangat penting untuk menyampaikan berbagai pandangan dan pemahaman keagamaan yang moderat di

kalangan civitas akademika PTKIN dan PTKIS. Prof. Dr. Suyitno, direktur pendidikan agama Islam, menambahkan bahwa rumah moderasi agama menjadi pusat kajian moderasi beragama melalui riset, seminar, dan workshop. Rumah moderasi beragama ini akan menjadi bank data kajian moderasi beragama yang akan menjadi dasar bagi kebijakan yang diambil [19].

Perguruan tinggi keagamaan Islam berperan dalam menghadapi tantangan ini dengan menawarkan pemahaman agama yang moderat, menjauhkan masyarakat dari pandangan-pandangan radikal yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan. Perguruan tinggi keagamaan Islam dapat menjadi pusat kajian moderasi beragama, tempat untuk mendalami nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan saling menghargai dalam konteks keislaman. Pusat-pusat kajian semacam itu dapat menjadi wahana kolaborasi antara akademisi, ulama, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan keberagaman. Perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki peran sentral dalam menyebarkan pemahaman agama yang seimbang dan menyeluruh. Melalui pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi dapat menyediakan ruang bagi kajian-kajian ilmiah dan dialog antarumat beragama yang memperkuat pemahaman tentang moderasi beragama. Perguruan tinggi keagamaan Islam juga memiliki peran sebagai model dalam menunjukkan penerapan moderasi beragama dalam kehidupan kampus. Kampus yang mengamalkan moderasi beragama menjadi contoh bagi mahasiswa dan masyarakat sekitarnya untuk mengadopsi sikap yang sama dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu fokus penelitian yang sedang dilakukan adalah mengenai Rumah Moderasi Keagamaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Proyek ini merupakan inisiatif pertama dari 58 PTKIN di Indonesia yang mendirikan rumah moderasi beragama, dan diresmikan oleh Menteri Agama RI, Fachrul Razi, pada 26 November 2019 di kampus 3 UIN Sunan Gunung Djati [20]. Keberadaan rumah moderasi beragama sebagai lembaga resmi sangat penting untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang moderat, terutama bagi kalangan akademisi dan masyarakat secara luas.



Rumah Moderasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung aktif menyelenggarakan kegiatan guna mengatasi radikalisme. Konsorsium Wahyu Memandu Ilmu dan Rumah Moderasi Beragama telah mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan penguatan Wahyu Memandu Ilmu dan Moderasi Beragama, melibatkan Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan Akademik, Kabag TU Fakultas, dan Kepala Sub Bagian TU Pascasarjana Se-UIN Bandung [21]. Rumah Moderasi Beragama di UIN Bandung juga telah menyusun modul-modul moderasi beragama yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama baik di lingkungan internal maupun eksternal. Modul-modul tersebut mencakup kompetensi pedagogik, integritas diri, wahyu memandu ilmu, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan [22]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga menjalin kerjasama dengan Polda Jabar untuk menciptakan *Islam rahmatan lil alamin* dan memperkuat kerukunan umat beragama di Jawa Barat [23].

Selain inisiatif Rumah Moderasi Beragama di PTKIN, Kementerian Agama melalui Sub Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum juga membentuk Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN). Tujuannya adalah memperkuat pemahaman moderasi beragama dan semangat bela negara [24]. Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung termasuk dalam sembilan perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara yang digagas oleh Kementerian Agama. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara bertujuan untuk melaksanakan tiga agenda utama, yaitu pendidikan dan pelatihan, kajian penelitian dan publikasi, serta advokasi dan pendampingan masyarakat. GMBBN juga bertujuan untuk memperkuat toleransi, menguatkan kerukunan dalam keberagaman, dan membangun sikap saling pengertian dan persatuan antar umat beragama [25].

Tulisan ini akan melihat bagaimana Rumah Moderasi Beragama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Islam Nusantara melaksanakan penguatan moderasi beragama dan program-program apa yang telah diadakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil

dari implementasi program ini juga akan dijelaskan, termasuk dampaknya bagi civitas akademika dan masyarakat luas. Dengan peran yang kuat dalam memperkuat moderasi beragama, perguruan tinggi keagamaan islam diharapkan mampu berkontribusi dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di wilayah Bandung Raya, serta berperan sebagai agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Perlu dicatat bahwa isu moderasi beragama menjadi perbincangan menarik dan relevan hingga saat ini, karena konsep ini bertujuan sebagai respon dan solusi preventif terhadap sikap beragama yang kurang toleran. Penelitian ini akan menjadi pelengkap studi sebelumnya mengenai peran perguruan tinggi dalam menghadapi paham radikal melalui penguatan moderasi beragama. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi gagasan dan implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan islam, tetapi juga akan membawa argumen terkait pentingnya penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengungkapkan dampak dari upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi keagamaan islam dalam menerapkan moderasi beragama. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia dengan fokus pada penguatan moderasi beragama.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung memiliki Rumah Moderasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan moderasi beragama, demikian pula dengan Universitas Islam Nusantara yang termasuk dalam program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara. Namun, di sisi lain, wilayah Bandung Raya dikenal sebagai daerah yang masih mengalami masalah intoleransi.

Oleh karena itu, tesis ini akan mengeksplorasi peran Rumah Moderasi Beragama di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Islam Nusantara dalam memperkuat moderasi beragama di wilayah internal kampus khususnya dan di Bandung Raya pada umumnya. Rumusan tersebut dipecah menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:



1. Bagaimana pandangan Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara terhadap konsep moderasi beragama?
2. Bagaimana kedua institusi, yaitu Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara menerapkan dan mengimplementasikan konsep moderasi beragama?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan konsep moderasi beragama di Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan penelitian dan harus ditetapkan untuk semua karya ilmiah yang didasarkan pada permasalahan. Berikut ini merupakan tujuan penelitian yang dapat disimpulkan dari rumusan masalah di atas:

1. Untuk memahami pandangan Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara terkait konsep moderasi beragama.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi moderasi beragama yang dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan konsep moderasi beragama oleh Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara.

### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi kalangan akademis, dengan menyajikan gagasan dan informasi baru mengenai kajian agama, khususnya terkait moderasi beragama. Selain itu, sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian lanjutan dalam subjek yang sama dengan berbagai paradigma dan pendekatan yang berbeda.
2. Dari sisi manfaat praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya meredam konflik yang berhubungan dengan agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama dan memperbaiki sikap terhadap kerukunan antar umat beragama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kerukunan antara anggota komunitas keagamaan intern dan kerukunan antara umat beragama dengan negara yang mendasarkan diri pada nilai-nilai humanisme.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Para ahli telah mengemukakan berbagai pendekatan penelitian agama, seperti antropologi, feminis, fenomenologi, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis [26]. Ketika seseorang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan terkait agama, jawabannya akan bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, seorang teolog akan memberikan jawaban berdasarkan prinsip-prinsip agama atau logika wahyu yang didukungnya. Sedangkan seorang filsuf akan memberikan jawaban dengan argumen rasionalistik yang didukung oleh penalaran. Seorang sosiolog, di sisi lain, akan menjawab berdasarkan realitas sosial masyarakat beragama dan pemikiran yang rasional dan empiris [27].

Program pemerintah yang berkaitan dengan isu agama biasanya mencakup kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, peningkatan pemahaman antaragama, dan toleransi beragama. Tujuan utama dari upaya pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk beragama tanpa menimbulkan konflik atau diskriminasi berdasarkan keyakinan agama. Moderasi beragama sendiri mencakup upaya untuk menekankan pada nilai-nilai toleransi,

dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan sikap saling memahami di antara pemeluk agama yang berbeda.

Pengarusutamaan moderasi beragama adalah fenomena sosial yang terus diperlihatkan dalam masyarakat beragama dan dalam implementasinya selalu melibatkan berbagai nilai yang beragam. Individu atau kelompok yang menganut paham moderat akan berusaha mencapai kesepakatan dalam pemahaman agama yang mencakup aspek tekstual dan kontekstual, sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Keadilan berarti memposisikan segala hal pada tempatnya dan melaksanakannya dengan baik dan secepat mungkin. Sementara itu, keseimbangan berarti berada di tengah-tengah antara dua kutub.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia membutuhkan kerjasama dan peran aktif dari tokoh agama, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Penanaman dan pembentukan karakter keberagamaan yang moderat merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan usaha bersama melalui berbagai strategi untuk mencapai pengarusutamaan moderasi beragama.

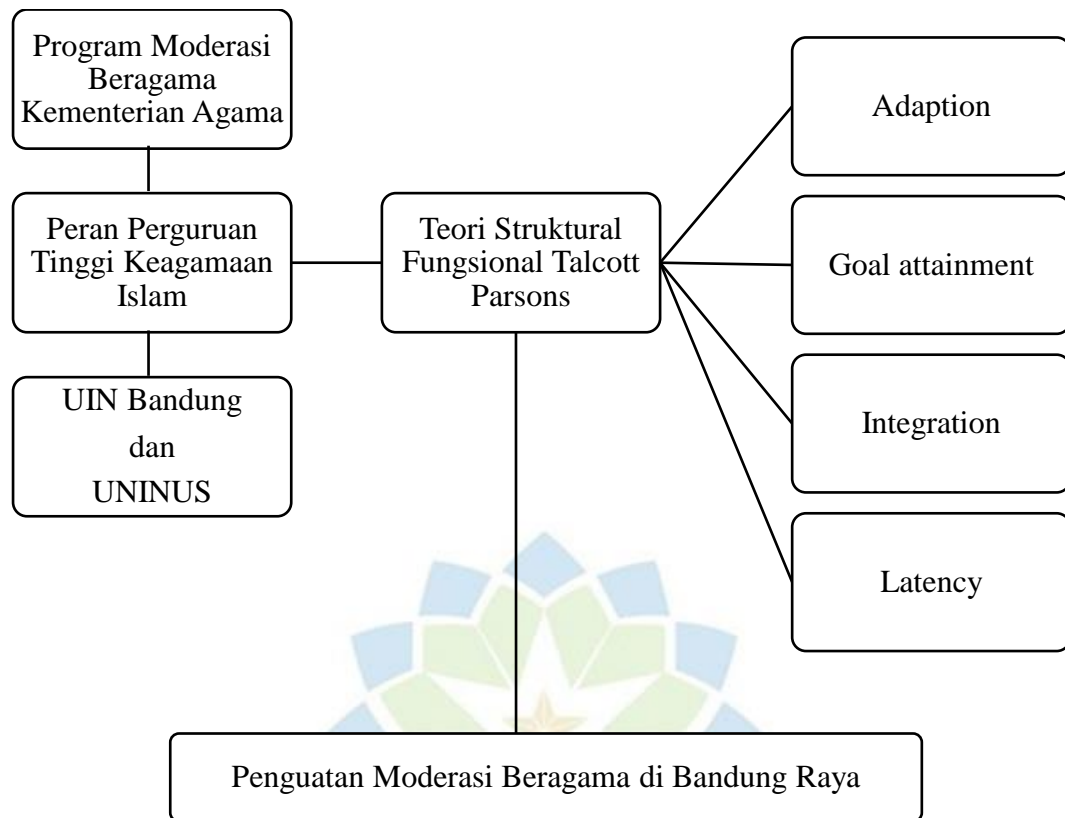
Lembaga pendidikan Islam memainkan peran strategis dalam mempromosikan pemahaman moderasi beragama. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, juga menegaskan pentingnya lembaga pendidikan agama dalam memajukan moderasi beragama [28]. Oleh karena itu, program dan tindakan yang terukur harus menjadi wujud dari institusi-institusi yang secara khusus mempertimbangkan penerapan strategi ini. Moderasi beragama dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menginternalisasi nilai-nilai inti ajaran agama, memperkuat komitmen terhadap negara, meningkatkan toleransi, dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama [17]. Moderasi beragama merupakan kunci untuk memupuk toleransi dan kerukunan baik dalam skala nasional maupun internasional.

Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi yang mulia, yaitu untuk mewujudkan manusia yang lebih berperilaku sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, dengan memahami nilai-nilai dan hakikat menjadi manusia. Hal

ini penting karena jika manusia tidak memahami nilai-nilai kemanusiaan, mereka bisa terjerumus dalam sifat-sifat binatang atau hewan. Perbedaan antara manusia dan hewan terletak pada kemampuan manusia dalam mengoptimalkan penggunaan rasio atau akal budi.

Dalam penelitian ini, digunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Inti dari pemikiran Talcott Parson adalah tentang bagaimana institusi sosial dapat berfungsi dalam hubungan yang saling terkait. Jika institusi sosial berfungsi dengan baik, struktur sosial juga akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika institusi sosial tidak berfungsi dengan baik, akan berdampak pada kerapuhan struktur sosial. Teori AGIL oleh Talcott Parsons mencakup empat skema fungsi, yaitu *Adaption* (penyesuaian), *Goal attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latent pattern maintenance* (pemeliharaan pola tersembunyi).

1. *Adaption* Adaption adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* adalah pencapaian tujuan, di mana suatu sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai hal-hal yang menjadi tujuan utamanya.
3. *Integration* adalah kemampuan suatu sistem untuk mengatur hubungan antara berbagai bagian komponennya agar saling terhubung dan berinteraksi dengan baik.
4. *Latent pattern maintenance* adalah pemeliharaan pola-pola tertentu dalam suatu sistem, yang mencakup menyediakan, merawat, dan memperbaharui hal-hal terkait, baik itu terkait motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi tersebut.



## F. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat berbagai penemuan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian dan variabel yang akan kami bahas. Namun, berdasarkan pengetahuan kami, belum ada penelitian sebelumnya yang secara langsung membahas peran perguruan tinggi agama Islam dalam mendemonstrasikan moderasi beragama di wilayah Bandung Raya. Dalam konteks tinjauan pustaka, beberapa kajian telah dilakukan mengenai hubungan antaragama, di antaranya:

1. Hasyim Muhammad dan Naili Ni'matul Illiyyun berjudul *Pengarusutamaan Moderasi Beragama di PTKIN* [29]. Artikel ini mengkaji pelaksanaan moderasi beragama di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kedua universitas ini memiliki landasan argumen teologis dan kultural dalam menerapkan moderasi beragama.

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN RMS) mengandalkan penalaran teologis berdasarkan surat al-Baqarah ayat 143 sebagai landasan untuk mempromosikan moderasi beragama. Konsep *wasathan* juga diambil dari hadits Nabi, yang menyatakan bahwa “sebaik-baik urusan adalah yang tengah”. *Wasathan* dalam konteks ini merujuk pada pendekatan tengah atau jalan moderat. Selain argumen teologis, UIN RMS juga menyajikan argumen kultural, menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama di kampus ini didasarkan pada tradisi yang telah lama berlangsung. Sebelum Kementerian Agama mendorong moderasi beragama, UIN RMS telah mengambil langkah-langkah moderat, seperti melarang pemakaian cadar, serta menentang berbagai aturan yang bertentangan dengan Pancasila. Beberapa dosen juga menghadapi mata kuliah mereka dengan pikiran terbuka, contohnya dalam kelas Perbandingan Agama, dosen tidak hanya memberikan materi dan presentasi, tetapi juga mengajak siswa untuk mengunjungi gereja agar mereka dapat berdialog dengan orang dari agama lain dan saling berinteraksi.

Kesimpulannya, kedua universitas ini telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan moderasi beragama dengan dasar argumen teologis dan kultural yang kuat, serta melalui berbagai inisiatif dan interaksi yang mendukung pemahaman yang lebih terbuka dan inklusif tentang agama.

2. Wahyuddin berjudul *Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dan Multikulturalisme Pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar* dalam Jurnal Ilmiah Islamic Resources Vol.18 No.2 Desember 2021 [30]. Multikulturalisme adalah pandangan yang khas di Indonesia, mencerminkan keberagaman budaya yang hidup dalam negara ini. Keanekaragaman ini merupakan aset yang istimewa dan unik bagi Indonesia, dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tak dapat dianggap sepele. Potensi keberagaman ini sangat berarti bagi perkembangan bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini dapat menyebabkan masalah seperti perpecahan dan konflik. Padahal, keragaman agama dan budaya seharusnya membawa kedamaian dan keharmonisan bagi pemeluk dan penduduknya. Sayangnya, realitasnya menunjukkan bahwa perbedaan agama dan budaya



kadang-kadang menyebabkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat, dengan berbagai kasus yang menyertainya. Oleh karena itu, nilai-nilai moderasi dan multikulturalisme sangat diperlukan sebagai alternatif dan solusi untuk mengatasi sikap masyarakat yang cenderung majemuk, radikal, dan anarkis.

Semakin kompleks dan beragamnya kehidupan masyarakat, termasuk dalam beragamnya cara hidup dan gagasan-gagasan keagamaan dan kebangsaan yang transnasional yang dapat mengancam kesatuan bangsa Indonesia, semakin penting peran lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan pemahaman antar budaya menjadi peran strategis yang diakui dan diberikan perhatian di Universitas Muslim Indonesia Makassar, terutama dalam materi ajar mata pelajaran agama dan program Pencerahan Hati.

3. Abdul Rosyid berjudul *Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama* dalam jurnal *Tarbawi*, Vol. 5 No. 2, 2022 [31]. Sejumlah perguruan tinggi Islam memiliki sikap yang berbeda terhadap kebijakan moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa lembaga ini mungkin memilih untuk menawarkan pembelajaran terpisah tentang moderasi beragama atau mengintegrasikannya ke dalam matakuliah yang ada. Penelitian ini menyoroti bahwa universitas-universitas telah memberikan respon yang beragam secara akademik dan sosial terhadap kebijakan moderasi beragama.

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana perguruan tinggi keagamaan negeri dan swasta merespons dan menerapkan kebijakan moderasi beragama. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki suasana dan budaya akademik yang khas, yang membedakannya dari yang lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan, konteks sosiokultural, serta visi dan misi lembaga. Karena perguruan tinggi juga merupakan bagian dari industri pendidikan, kebijakan

publik seperti moderasi beragama tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara seksama terhadap aspek akademik.

Namun demikian, keberagaman materi dan sudut pandang yang ada di perguruan tinggi sebenarnya menjadi suatu kekayaan, yang dapat menghasilkan berbagai cara pandang dan sikap yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan aturan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi.

4. Muhammad Khairul Rijal, dkk berjudul *Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa* dalam Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol. 10, No. 1, 2022 [32]. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme agama dapat diartikan sebagai fanatisme yang menolak pandangan orang lain, menutup dialog, dan dengan cepat menyalahkan kelompok yang memiliki pemahaman berbeda, tanpa memperhatikan esensi dari ajaran syariah. Ekstremisme agama dimulai dari pandangan, mentalitas, dan perilaku keagamaan yang eksklusif. Dengan demikian, pendekatan strategis untuk melawan narasi agama yang ekstrem adalah melalui konsep moderasi, atau "*wasatiyah*". Moderasi beragama dapat menjadi jembatan antara semangat beragama dan loyalitas terhadap negara.

Untuk menanggapi maraknya ideologi keagamaan radikal di kalangan mahasiswa, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi aktivis di Kalimantan Timur terkait moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebagai pendekatan metodologinya. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk naratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 57% dari aktivis mahasiswa yang menjadi bagian kelompok menyatakan memahami konsep moderasi beragama, sementara 43% menyatakan sebaliknya. Selain itu, masih terdapat pola pikir yang cenderung mengutamakan pandangan yang eksklusif dan mungkin mendukung pandangan keagamaan yang radikal dan ekstrem, terutama dalam konteks studi agama yang terkait dengan budaya lokal. Penemuan ini menekankan pentingnya membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman moderasi beragama sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan

penyebaran pandangan, sikap, dan perilaku yang mendukung radikalisme agama.

5. Rosyida Nurul Anwar dan Siti Muhayati berjudul *Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Volume 12. No. 1, 2021 [33]. Karena kecenderungan mereka untuk melihat isu agama secara absolut, mahasiswa universitas negeri sekarang menjadi lebih rentan terhadap gerakan radikal, karena ide-ide ekstremisme dan radikalisme telah merasuki lingkungan pendidikan. Dalam upaya untuk mempersiapkan generasi masa depan umat Islam, Pendidikan Agama Islam (PAI), yang populer di kalangan siswa sebagai topik inti, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan semangat moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mata kuliah PAI berusaha menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan membentuk pola pikir yang mengedepankan sikap moderat pada mahasiswa. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan pendokumentasian.

Berdasarkan temuan peneliti, matakuliah PAI membantu mahasiswa dalam memahami metodologi pengajaran Islam, menekankan pentingnya karakter moderat dalam kurikulumnya, dan mendorong sikap teladan dari para pengajar untuk mempromosikan moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Selain itu, terdapat ruang diskusi, program pendampingan, dan pengembangan unit kegiatan kemahasiswaan, serta proses evaluasi dalam rangka menghargai keberagaman dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menjalankan agama secara tenang dan moderat.